

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, 5 Januari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SUHARYO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16
2.1 Urusan Wajib	16
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	46
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	47
4.1 Kerjasama Daerah.....	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	49

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.2.1	Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	9
Tabel 1.2.2	Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.....	10
Tabel 2.1.2	Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2022.....	17
Tabel 2.1.3	Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	23
Tabel 2.1.4	Tabel alokasi dan realisasi Tahun 2022.....	27
Tabel 2.1.5	Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	29
Tabel 2.1.6	Tabel Permasalahan dan solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	38
Tabel 2.1.7	Tabel Kebijakan strategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	40
Tabel 2.1.8	Tabel Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan SKPD yang baru dibentuk pada awal Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).

Maka berdasarkan perkembangan yang ada sejak tanggal 03 Januari 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mulai menjalankan roda Organisasi karena pada tanggal tersebut baru dilantiknya pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

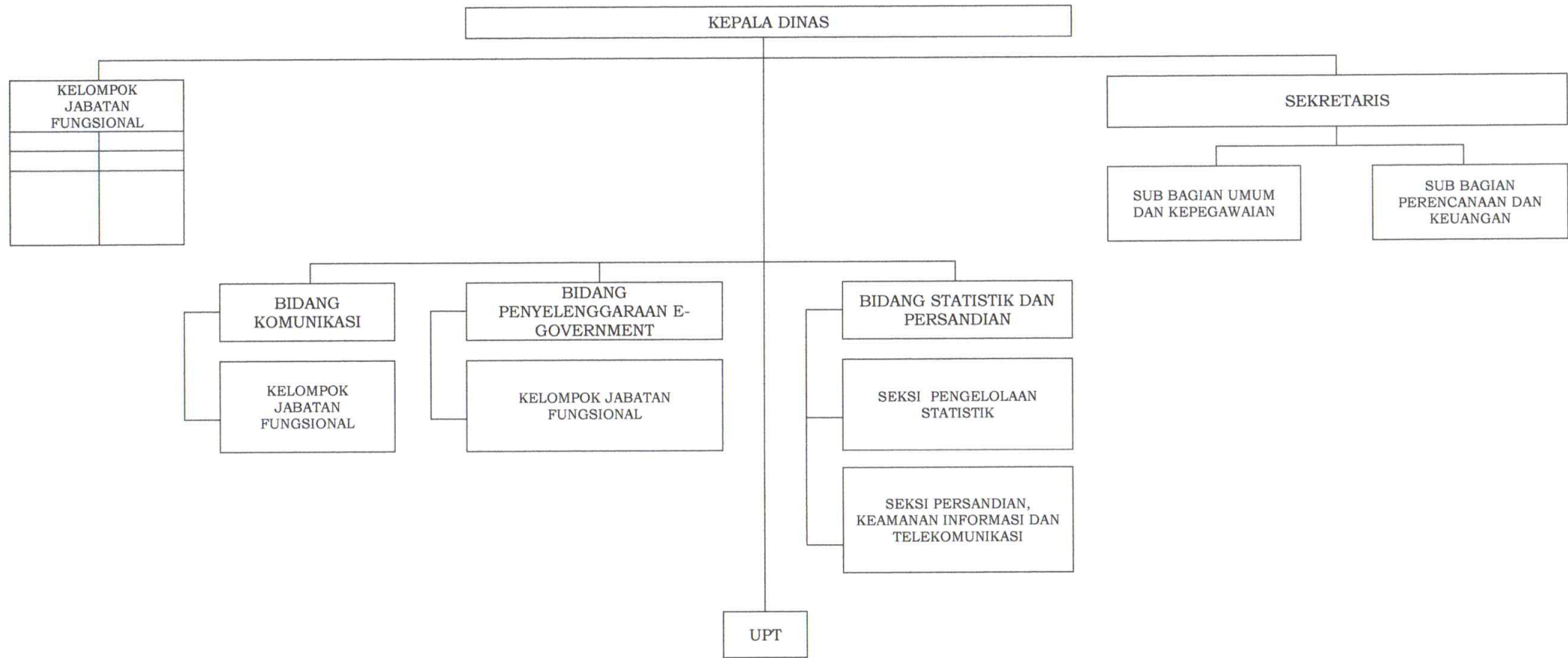
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Susunan Organisasi beserta uraian tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - 2). Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Komunikasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.

- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
 - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
 - f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan *E-Government*;
 - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan *E-Government*;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang Penyelenggaraan *E-Government*;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *E-Government*;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Statistik

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

Seksi Persandian

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

b) Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai jumlah PNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 42 orang terdiri dari 19 orang PNS dan 23 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: - orang
Kepala Bidang Komunikasi	: 1 orang
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	: 1 orang
Kepala Bidang Statistik dan Pesandian	: 1 orang
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Kepala Seksi Pengelolaan Statistik	: 1 orang
Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	: 1 orang
Staf Pelaksana/Fungsional	: 11 orang
Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 23 orang

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan ruang:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: 1 orang
b. Golongan IV/b	: - orang
c. Golongan IV/a	: 2 orang

Golongan III

a. Golongan III/d	: 4 orang
b. Golongan III/c	: 1 orang
c. Golongan III/b	: 3 orang

- d. Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II
- a. Golongan II/d : 3 orang
 - b. Golongan II/c : 2 orang
 - c. Golongan II/b : - orang
 - d. Golongan II/a : 1 orang

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SD/MI	-	
2.	SLTP/MTs	-	
3.	SLTA/SMK	2	
4.	D.III	5	
5.	S1/D.IV	11	
6.	S2	1	
	Jumlah	18	

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan *E-Government* Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.2

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM
3	Sepeda Motor	6	Cukup baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas
4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp
7	Global Positioning System (GPS)	1	Rusak Berat	Peralatan GPS
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Kurang Baik	-
9	Lemari Besi	9	Baik	Lemari arsip
10	Rak Besi/Metal	10	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip
11	Filling Besi/Metal	4	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)

12	Brand Kas	1	Baik	-
13	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci
14	Lemari kayu	2	Kurang baik	Lemari 2 pintu
15	Papan Visuil	3	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang
16	Papan Nama Instansi	1	Baik	-
17	Papan Pengumuman	8	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi
18	Mesin Absensi	93	Baik	Mesin Absensi untuk menunjang pelaksanaan kehadiran pegawai di SKPD
19	Genset	2	Baik	
20	Mesin Pompa Air	1	Baik	-
21	Papan Nama Ruang/Jabatan	12	Baik	-
22	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang
23	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja
24	Meja Rapat	4	Baik	Meja rapat
25	Meja Resepsionis	1	Baik	-
26	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi
27	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu
28	Kursi Lipat	10	Baik	Kursi lipat pengadaan Tahun 2018
29	Meja Komputer	2	Baik	-
30	Sofa	2	Baik	-
31	Kursi Kerja	39	Baik	Kursi kerja eselon dan staf
32	Meja Kerja	12	Baik	-
33	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-
34	AC Split	9	Baik	-
35	Exhause Fan	1	Baik	-
36	Televisi	2	Baik	untuk di Bidang E Government
37	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran Warna Silver
38	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri
39	Tandon Air	1	Baik	-
40	Tabung Pemadam Api	2	Cukup baik	-
41	Mainframe	3	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB

42	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management, Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall'
43	P.C Unit/ Komputer PC	24	Baik	-
44	Laptop	11	Baik	-
45	Note Book	2	Kurang baik	-
46	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing
47	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server
48	Monitor	2	Baik	LCD Monitor
49	Printer	19	baik	-
50	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Rusak Berat	Rictifier
51	UPS	7	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer- Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack
52	Stabilizer/Stavolt	3	Baik	Stabilizer / INFORMASI
53	Harddisk Eksternal	4	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual
54	Memory	2	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD
55	Router	67	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router
56	Modem	21	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway dan MODEM BID.EGOV TH 2018
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/ gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan instalasinya, print server
58	Tiang Antene	7	Baik	Tiang Hotspot
59	Radio Access Point	37	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station recieve dan

				wds) Radio Point to Point (Station receive dan wds) Radio point to point(station receive dan wds)
60	Antene	5	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e-governm
61	Switch Hub	23	Baik	-
62	Wireless Access Point	6	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)
63	Anti Petir/Ground Jaringan	1	Baik	-
64	Adaptor WIFI	1	Rusak Berat	wifi streaming portable
65	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor
66	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone
67	Headphone	12	Baik	-
68	Microphone/Wireless Mic	7	Baik	-
69	Professional Sound System	3	Kurang Baik	Sound Sistem
70	Microphone Table stand	6	Kurang Baik	-
71	Handycam	1	Baik	-
72	Stand Microphone	5	Cukup Baik	-
73	Televisi	1	Baik	
74	Camera Electronic	3	Baik	-
75	Amplifier	1	Baik	Amplifier
76	Loudspeaker	2	Baik	speaker
77	Handy Talky	8	Baik	-
78	Handphone	5	Baik	-
79	Unit Transceiver VHF Portable	1	Kurang baik	Mixer Siaran
80	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	3	Kurang baik	Repeater dan Transmitter VHF (Radio Pantau); Antena Repeater dan kelengkapannya
81	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	1	Baik	SOUND SYSTEM
82	Unit Pemancar HF/SW Stationary	1	Rusak Berat	radio repeater/ pemancar ulang
83	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	4	Kurang baik	Antena dan Instalasi
84	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	2	Baik	-
85	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Cukup Baik	Tabung Pemancar Radio Tuntung Pandang FM dan Exiter Pemancar Radio

86	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter
87	Preamplifier PM Tube Bose	1	Rusak Berat	-
88	Mixer Router	1	Rusak Berat	-
89	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN KAMTIBMAS
90	CCTV	1	Baik	cctv 8 channel
91	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-
92	Stand Microphone	5	Baik	-
93	Meja Siaran	3	Baik	-
94	Kursi Staf	10	Baik	-
95	Air Conditioner 1 PK	4	Baik	-
96	Air Conditioner 1,5 PK	1	Baik	-
97	Kipas Angin	2	Baik	-
98	Televisi LED TV 40 inch	1	Baik	-
99	PC Unit	3	Baik	-
100	Laptop	5	Baik	-
101	Scanner	1	Baik	-
102	Printer	2	Baik	-
103	Meja Kerja	1	Baik	-
104	Kursi Kerja	1	Baik	-
105	Kursi Tamu	1	Baik	-
106	Layar Proyektor 120"	1	Baik	-
107	Alat pengontrol temperatur/suhu ruangan	1	Baik	-
108	Drone	1	Baik	-
109	Kamera Video	4	Baik	-
110	Video Capture	2	Baik	-
111	Tangga Teleskopik	1	Baik	-
112	Bracket TV up to 65 Inch	2	Baik	-
113	Alat Pemadam Api Ringan Fireball	6	Baik	-
114	Alat Pemadam Api Ringan Tabung	1	Baik	-
115	PC DEKSTOP	1	Baik	-
116	UPS 30 Kva (include Modular Battery Cabinet, Battery String)	1	Baik	-
117	MEMORY (RAM) 8 GB DDR4	1	Baik	-
118	Hardisk eksternal 2 TB	1	Baik	-
119	Perangka Jaringan Lainnya	1	Baik	Cloud Core Router, Access Point SKPD, Switch Hub, Splitter 1:4 Optical Distribution Point, Splitter 1:8 Optical Distribution Point, Optical Network

				Termination (ONT)
120	Jaringan Fiber Optik Antar SKPD	1	Baik	-
121	Rackmount	3	Baik	-
122	FO Toolkit	1	Baik	-
123	Perangkat Video Conference	2	Baik	-
124	Perangkat Keamanan Ruang NOC	1	Baik	CCTV dan Alarm
125	Panel listrik ruang NOC	1	Baik	-
126	Aplikasi penunjang E-Government	6	Baik	-
127	Komputer/PC	1	Baik	-
128	Komputer Tablet	1	Baik	-
129	UPS 6000 V	1	Baik	-
130	Magnetic Switch 220 V	2	Baik	-
131	Peralatan Studio Video dan Film	1	Baik	-
132	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Baik	-

Sumber Daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.

d) Data statistik

Data statistik yang dapat disajikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah data statistik lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut (<http://data.tanahlautkab.go.id:8080/>).



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2.1 Urusan Wajib

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan urusan wajib yakni urusan Komunikasi dan Informatika serta Statistik dan Persandian.

2.1.1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Renstra dan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2022

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)		KET.	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
1	- Terwujudnya penyebaran informasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Laut	Y	- Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut - Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan teknologi	Y	IKU		- Program Pengeluaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pengeluaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Y								

			informasi														
						1					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah	Y	2.420.881.290		
			- Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah									
						2					Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Y	49.971.151		

2	Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	- Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	IKU		- Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut	- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y							
						3					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Y	2.881.153.600		
						4					Pengelolaan e-governmen Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Y	71.700.000		

3	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	T	- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral SKPD	Y	IKU	5	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Persentase statistik sektoral daerah	Y							
											Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Y	49.805.090		
4	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	T	- Meningkatkan fasilitas layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	T	Bukan IKU				- Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	T							
5	Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan		- Meningkatkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan - Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan				- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu - Nilai SAKIP SKPD - Nilai RB SKPD								

			kepegawaian														
						6				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	-	17.420.000			
						7				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	-	3.812.860.717			
						8				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	0			
						9				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pemenuhan umum perangkat daerah	-	267.088.059			
						10				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	0			

						11					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	719.522.121		
						12					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	184.074.891		
													JUMLAH		10.474.476.919,-		

2.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 seluruhnya bersumber dari APBD/APBD-P tidak ada dari APBN. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	APBD
7)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717	
4)			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1)			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.339.079	
2)			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.939.516	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
4)			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.809.464	
			Penyediaan Bahan/Material	13.000.000	
5)			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.925.151	
3)			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.596.970	
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.983.593	
2)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.674.298	
3)			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.417.000	
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
1.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			APBD
3)			Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.096.250.150	APBD
4)			Pelayanan Informasi Publik	324.631.140	
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
1.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			APBD
1)			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600	
2.		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
3)			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000	
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
1.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			APBD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
1)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	49.805.090	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
1.		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			APBD
1)			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151	APBD
Jumlah				10.474.476.919	

2.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tabel alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.965.788	4.296.200.693	85,91	704.765.095	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.420.000	9.227.500	52,97	8.192.500	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	5.525.000	62,08	3.375.000	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000	3.702.500	43,46	4.817.500	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.812.860.717	3.157.384.106	82,81	655.476.611	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717	3.154.061.206	82,82	654.319.511	APBD
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000	3.322.900	74,17	1.157.100	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.088.059	252.910.465	94,69	14.177.594	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.339.079	4.713.900	88,29	625.179	APBD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.939.516	27.195.600	75,67	8.743.916	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.809.464	15.898.100	94,58	911.364	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	13.000.000	13.000.000	100,00	0	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	192.102.865	98,01	3.897.135	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	719.522.121	698.357.022	97,06	21.165.099	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.925.151	115.727.962	92,64	9.197.189	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.596.970	582.629.060	97,99	11.967.910	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.074.891	178.321.600	96,87	5.753.291	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.983.593	56.214.500	98,65	769.093	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.674.298	108.157.100	96,85	3.517.198	APBD

	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.417.000	13.950.000	90,48	1.467.000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.420.881.290	2.290.440.245	94,61	130.441.045	APBD
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.420.881.290	2.290.440.245	94,61	130.441.045	APBD
	- Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.096.250.150	1.980.310.000	94,47	115.940.150	APBD
	- Pelayanan Informasi Publik	324.631.140	310.130.245	95,53	14.500.895	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.952.853.600	2.850.226.000	96,52	102.627.600	APBD
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.881.153.600	2.787.251.000	96,74	93.902.600	APBD
	- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600	2.787.251.000	96,74	93.902.600	APBD
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.700.000	62.975.000	87,83	8.725.000	APBD
	- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000	62.975.000	87,83	8.725.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.805.090	47.370.000	95,11	2.435.090	APBD
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.805.090	47.370.000	95,11	2.435.090	APBD
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	49.805.090	47.370.000	95,11	2.435.090	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49.971.151	37.293.750	74,63	12.677.401	APBD
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151	37.293.750	74,63	12.677.401	APBD
	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151	37.293.750	74,63	12.677.401	APBD
	JUMLAH	10.474.476.919	9.521.530.688	90,90	952.946.231	

2.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5 Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo bagi masyarakat, sehingga beberapa masyarakat menilai kurang puas dengan pelayanan dari Dinas Kominfo.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan peningkatan layanan melalui media informasi maupun sarana prasarana yang dimiliki kepada SKPD Lingkup Pemerintah Tanah Laut dan masyarakat umum	Peningkatan pelayanan dengan melakukan sosialisasi tugas dan fungsi Dinas Kominfo baik ke seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat umum dalam setiap event/kegiatan serta melalui media informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan	12 Bulan	12 Bulan	-	-		

			Tunjangan ASN				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	38 Dokumen	38 Dokumen	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	-	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Jenis	21 Jenis	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				

			Daerah					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-		-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	-		-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-		-
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Media	5 Media	indeks keterbukaan informasi publik mengalami penurunan pada tahun 2021	-	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media radio tuntung pandang
								Memaksimalkan peningkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi maupun bimtek peningkatan kapasitas petugas pengelola informasi

			- Perbup Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	Pelayanan Informasi Publik	100 Data/Informasi	188 Data/Informasi	<p>dengan program Siaran Info Tala, Tanah Laut Menyapa dan Ruang Inspirasi dengan menghadirkan narasumber dari instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun instansi vertikal dan narasumber inspiratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan informasi pembangunan melalui media sosial instagram, facebook, youtube dan website tpfm.tanahlautkab.go.id - Pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) melalui website ppid.tanahlautkb.go.id dimana Diskominfo Tanah Laut sebagai PPID utama yang mengkoordinir PPID Pembantu pada setiap badan publik (satuan kerja) dilingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut - Melakukan monitoring berkala setiap trimester terhadap informasi yang telah dipublikasikan melalui website ppid.tanahlautkab.go.id - Melakukan rapat koordinasi setiap tahun anggaran 	pada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
--	--	--	--	----------------------------	-----------------------	-----------------------	---	--

						<p>dengan seluruh PPID Pembantu dan Pejabat Penghubung LAPOR yang dijabat oleh Sekretaris pada masing masing SKPD dalam rangka evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik dan penanganan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka ruang konsultasi dan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu serta Pejabat Penghubung LAPOR serta operator website melalui grup whatsapp PPID dan LAPOR - Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 			
						<p>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pemanfaatan jaringan fiber optik penghubung antar SKPD guna mendukung program smart city di Kabupaten Tanah Laut - kondisi blankspot 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo telah membangun jaringan fiber optik antar SKPD yang telah menghubungkan internet pada 30 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tersedianya jaringan intranet dan internet terpusat pada Dinas Kominfo guna mendukung terselenggaranya SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan internet guna mendukung program smart city - Dalam

				Kabupaten/Kota					
		Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 SKPD	30 SKPD	1. Kecamatan selain Kecamatan Pelaihari belum terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Tenaga Teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan terbatas	1. Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi dengan jaringan Pemkab 2. Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan	
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik					
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1. Kebutuhan Tenaga Teknis Pengembangan Aplikasi Belum Seimbang dengan jumlah kebutuhan permintaan pengembangan aplikasi 2. Belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik SKPD yang akan melakukan perencanaan penganggaran pengembangan aplikasi	1. Perlu penambahan tenaga teknis khusus yang membidangi pengembangan aplikasi	

2	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Belum lengkapnya data indikator sektoral pada portal web satu data tanah laut untuk mendukung proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tanah Laut oleh pemangku kebijakan	Telah tersajinya data statistik sektoral di semua SKPD pada portal satu data http://data.tanahlautkab.go.id/	Menyajikan data statistik sektoral sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 guna mendukung program Satu Data Tanah Laut dan Satu Data Indonesia	
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	131 Eksemplar	131 Eksemplar	Belum Lengkapnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD		Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut
3	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			<i>Server development/production</i> yang terhubung dengan API BSrE untuk penerapan TTE belum digunakan secara optimal karena menunggu regulasi dan administrasi terpenuhi	Telah dilaksanakan uji coba/uji kesesuaian dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (Foto saat uji coba terlampir) - Asistensi penerapan modul TTE BSrE untuk integrasi ke sistem yang sudah ada	Menindaklanjuti terkait penerapan modul TTE BSrE dan persiapan <i>server development/production</i> untuk uji coba.	

			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Tahun 2019	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
		- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 211 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik					

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6 Permasalahan dan Solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Sekretariat	Tidak ada permasalahan yang mendasar, kegiatan berjalan baik, secara fisik sudah hampir terlaksana seluruhnya 100%, sisa anggaran karena efisiensi	-	
2.	Bidang Komunikasi	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum maksimal. 2. Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan. 3. Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik. 4. Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal. 5. Anggaran untuk publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media masih belum mencukupi. 6. Belum tersedianya anggaran khusus untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam menjalankan kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM. 2. Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website: <ol style="list-style-type: none"> 1. http://ppid.tanahlautkab.go.id 2. http://portal.tanahlautkab.go.id 3. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Informasi publik. 4. Memanfaatkan secara optimal media-media informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online. 5. Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi terkait daftar informasi publik dan kendala 	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
			<p>dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan rapat koordinasi me-nge-nai pengelolaan informasi publik dalam menunjang keterbukaan informasi publik pada bulan Oktober 2022. <p>6. Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD untuk menyampaikan materi terkait penggunaan APBDes untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kab. Tanah Laut.</p>	
3.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	<p>Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan selain Kecamatan Pelaihari belum terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. 2. Tenaga Teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan terbatas. 3. Dana yang tersedia untuk pemeliharaan dan perawatan sangat terbatas. 4. Kebutuhan Tenaga Teknis Pengembangan Aplikasi Belum Seimbang dengan jumlah kebutuhan permintaan pengembangan aplikasi. 5. Belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik SKPD yang akan melakukan perencanaan penganggaran pengembangan aplikasi. 6. Masih memerlukan dana untuk pemenuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. 2. Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan. 3. Perlunya penambahan penganggaran untuk peningkatan kualitas layanan SPBE. 4. Perlu penambahan tenaga teknis khusus yang membidangi pengembangan aplikasi. 5. Perlu penganggaran untuk 4 arsitektur SPBE untuk pemenuhan 6 arsitektur SPBE. 	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
		dokumen arsitektur SPBE sesuai yang diamanatkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE.		
4.	Bidang Statistik dan Persandiaan	<p>Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Lengkapnya Data Statistik Sektorial yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD. 2. Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah dibangun belum diujicobakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektorial di Kabupaten Tanah Laut. 2. Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BSrE terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru. 3. Asistensi penerapan modul TTE BSrE untuk integrasi ke sistem yang sudah ada. 4. Mempersiapkan server <i>development/production</i> untuk uji coba penerapan sistem yang sudah diperbarui. 	

2.1.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.7 Kebijakan Strategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pengoptimalan penyelenggaraan	Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas	Peningkatan Nilai/Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten

	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut	Tanah Laut dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
2	Pemanfaatan Aplikasi Satu Data Tanah Laut.	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/627-KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2022	Tersedianya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.

2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2022 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang diselesaikan
1.	Peningkatan pelayanan dengan melakukan sosialisasi tugas dan fungsi Dinas Kominfo baik ke seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat umum dalam setiap event/kegiatan serta melalui media informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan peningkatan layanan melalui media informasi maupun sarana prasarana yang dimiliki kepada SKPD Lingkup Pemerintah Tanah Laut dan masyarakat umum, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - mengkoordinir terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut, menyediakan layanan internet dan data terpusat - menyediakan layanan fasilitasi Teknologi Informasi seperti pengembangan aplikasi Pemerintah Daerah, jaringan, integrasi data, layanan <i>hosting</i>, <i>colocation server</i> dan digitalisasi. - menyediakan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya nilai/indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam kategori Baik - Tersedianya layanan fasilitasi Teknologi Informasi yang baik - Terfasilitasinya kegiatan video conference baik melalui zoom maupun youtube - Terselenggaranya forum komunikasi publik dalam bentuk dialog interaktif/talk show di Radio Tuntung Pandang FM - Terselenggaranya keterbukaan informasi publik guna mendukung transparansi pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut - Terbinanya kelompok informasi masyarakat untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat - Terselenggaranya

		<p>video conference bagi pimpinan dan SKPD di Lingkup Kabupaten Tanah Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan kerjasama dalam pengisian acara di radio Tuntung Pandang FM - pengelolaan website PPID secara bersama seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - pembinaan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - menyebarluaskan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut - Melakukan pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan sosialisasi e-lapor secara langsung dengan masyarakat saat kegiatan Manunggal Tuntung Pandang - Pengelolaan data statistik sektoral daerah melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut. 	<p>penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui kanal resmi milik pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-lapor sebagai wadah yang aspirasi dan aduan online dari masyarakat atas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut - Tersedianya data statistik sektoral daerah yang akurat guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut
2.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan internet guna mendukung program smart city	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo telah membangun jaringan fiber optik antar SKPD yang telah menghubungkan internet pada 30 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jaringan intranet dan internet terpusat pada Dinas Kominfo guna mendukung terselenggaranya SPBE dengan baik di Kabupaten Tanah Laut
3.	Memaksimalkan peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi pembangunan tersampaikan kepada

	<p>keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi maupun bimtek peningkatan kapasitas petugas pengelola informasi pada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</p>	<p>pembangunan melalui media radio tuntung pandang dengan program Siaran Info Tala, Tanah Laut Menyapa dan Ruang Inspirasi dengan menghadirkan narasumber dari instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun instansi vertikal dan narasumber inspiratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi pembangunan melalui media sosial instagram, facebook, youtube dan website tpfm.tanahlautkab.go.id - Pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) melalui website ppid.tanahlautkb.go.id dimana Diskominfo Tanah Laut sebagai PPID utama yang mengkoordinir PPID Pembantu pada setiap badan publik (satuan kerja) di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut - Melakukan monitoring berkala setiap trimester terhadap informasi yang telah dipublikasikan melalui website ppid.tanahlautkab.go.id - Melakukan rapat koordinasi setiap tahun anggaran dengan seluruh PPID Pembantu dan Pejabat Penghubung LAPOR yang dijabat 	<p>masyarakat dan mengajak masyarakat secara interaktif untuk turut berperan serta dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya forum konsultasi publik antara masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah melalui dialog interaktif baik secara langsung melalui siaran radio maupun media sosial. - Penyebarluasan informasi terkait pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. - Tersedianya informasi badan publik yang wajib dipublikasikan sesuai amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa - Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat - Peningkatan kapasitas petugas pengelola informasi melalui bimbingan teknis. - Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu lebih
--	--	---	---

		<p>oleh Sekretaris pada masing masing SKPD dalam rangka evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik dan penanganan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka ruang konsultasi dan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu serta Pejabat Penghubung LAPOR serta operator website melalui grup whatsapp PPID dan LAPOR - Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 	meningkat
4.	Dalam mengatasi kondisi Blankspot internet di beberapa titik dilakukan dengan pola kerjasama pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan layanan internet menggunakan jaringan lastmile 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan internet akan dapat diakses oleh masyarakat di area blankspot
5.	Percepatan pengisian Command Center melalui langkah alternatif maupun pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan terlaksananya koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut dan berpotensi dapat membantu pembiayaan untuk pengisian perangkat Command Center - Mendatangkan Narasumber yang berkompeten di bidang Command Center pada APBD Perubahan Tahun 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dana untuk pengisian perangkat Command Center melalui pihak ketiga sehingga Command Center dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan layanan publik.
6.	Penambahan tenaga teknis untuk pembuatan dan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diperkenalkannya penambahan tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya tenaga IT yang ada sehingga menghambat

pengelolaan aplikasi	teknis/pegawai tidak tetap maka Dinas Kominfo menunggu informasi lebih lanjut terkait PPPK atau sejenisnya	dalam proses pengembangan aplikasi dalam mendukung terselenggaranya SPBE
----------------------	--	--

Urusan Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang diselesaikan
1	Menyajikan data statistik sektoral sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 guna mendukung program Satu Data Tanah Laut dan Satu Data Indonesia	Telah tersajinya data statistik sektoral di semua SKPD pada portal satu data http://data.tanahlautkab.go.id/	Telah tersedianya data indikator sektoral pada portal web satu data tanah laut untuk mendukung proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tanah Laut oleh pemangku kebijakan
2	Menindaklanjuti terkait penerapan modul TTE BSrE dan persiapan server <i>server development/production</i> untuk uji coba.	Telah dilaksanakan uji coba/uji kesesuaian dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (Foto saat uji coba terlampir)	Telah tersedianya <i>server development/production</i> yang terhubung dengan API BSrE untuk penerapan TTE

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

4.1.1 Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Kerja Sama Pengembangan/Pemakaian Aplikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Mekanisme Penerapan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

4.1.2 Dasar Hukum

- a. Dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama antara antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/70//DISKOMINFO dan Nomor: 134.4/20//DISKOMINFO tentang Kerja Sama Pengembangan/Pemakaian Aplikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/70//DISKOMINFO tentang Mekanisme Penerapan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

4.1.3 Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah pengembangan aplikasi penunjang kinerja pemerintahan daerah.

4.1.4 Nama Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan bersumber dari APBD Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp 0,-.

4.1.6 Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan tertulis Para Pihak.

4.1.7 Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari adanya kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi para pihak yang bekerja sama dan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas dalam pengembangan dan pemakaian aplikasi.

4.1.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu:

1. Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2022.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

-